

RANGKAIAN PENGAMBILAN DATA USAI, OMBUDSMAN CERMATI LAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANGKA

Sabtu, 03 Oktober 2026 - kepbabel

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah menyelesaikan tahap pengambilan data lapangan dalam Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 di Kabupaten Bangka pada Jumat, 2 September 2026.

?Kabupaten Bangka menjadi lokus terakhir dalam rangkaian pengambilan data lapangan sebelum seluruh data diolah dan diverifikasi secara berjenjang oleh tim Ombudsman.

?Dalam tahap pengambilan data ini, Ombudsman mencermati berbagai aspek penting penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari pengelolaan pengaduan hingga penyediaan informasi mengenai standar pelayanan kepada masyarakat.

?Pengambilan data di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka menyasar beberapa instansi, antara lain Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, RSUD Depati Bahrin, serta SD Negeri 10 Sungailiat.

Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan pada instansi vertikal seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, dan Kepolisian Resor (Polres) Bangka khususnya pada layanan SPKT dan Satintelkam.

?Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs. Chris Fither, menekankan bahwa sistem pengelolaan pengaduan menjadi fokus perhatian utama.

? "Pengaduan tidak berhenti pada apakah masalahnya sudah selesai atau belum. Yang juga penting adalah bagaimana pengaduan diterima, dicatat, ditindaklanjuti, dan dievaluasi oleh penyelenggara," ujar Fither melalui keterangan resminya, Jumat.

?Ia menambahkan, dari proses pengelolaan pengaduan yang baik, penyelenggara layanan dapat memperoleh masukan berharga untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik.

?Selain pengaduan, ketersediaan dan kejelasan informasi terkait standar pelayanan juga diperiksa ketat. Menurut Fither, standar pelayanan bukan sekadar dokumen administrasi internal, melainkan hak masyarakat untuk mengetahuinya saat hendak mengakses layanan.

?Metode pengumpulan data dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pemeriksaan dokumen pendukung, observasi langsung pada unit layanan, hingga wawancara mendalam dengan pihak penyelenggara maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

?Selesainya pengambilan data di Kabupaten Bangka menandai berakhirnya seluruh rangkaian pengumpulan data

lapangan di wilayah Bangka Belitung. Meski demikian, pihak Ombudsman menegaskan bahwa tahapan ini belum menghasilkan kesimpulan atau pengumuman hasil penilaian.

?Seluruh data yang terhimpun akan diproses melalui tahapan pengolahan, verifikasi, dan finalisasi. Rencananya, hasil akhir Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 akan diumumkan secara nasional oleh Ombudsman RI pada akhir tahun 2026 kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala daerah terkait.